



JPPMI: Jurnal Produk Pengabdian Masyarakat Indonesia
Vol. 2, No. 3, Oktober 2025 Hal 232 – 239
ISSN 3030-8313 (online)

**IMPLEMENTASI PENINGKATAN KEMAMPUAN BAYAR
PESERTA JKN-MANDIRI MELALUI USAHA KECIL
DAN MENENGAH KADER PKK DI KELURAHAN
BANDUNG REJOSARI**

*IMPLEMENTATION TO IMPROVE THE PAYMENT
ABILITY OF BPJS-MANDIRI THROUGH OF SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES BY PKK CADRES IN BANDUNG
REJOSARI VILLAGE*

Ngesti W Utami¹, Eko Rahman²,

¹⁻² Prodi Studi D-III Asuransi Kesehatan Jurusan RMIK Poltekkes Malang
ngesti_w@poltekkes-malang.ac.id¹,

Abstrack

Menurunnya pendapatan pada sebagian masyarakat akibat perubahan ekonomi, berkaitan dengan menurunnya kemampuan bayar bagi peserta JKN mandiri (PBU). Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan BPJS Kesehatan adanya peserta yang menunggak bayar iuran. Data menunjukkan terjadi penumpukan tunggakan pembayaran iuran, yaitu sekitar 50% tidak mampu bayar di tahun 2022. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya meningkatkan kemampuan bayar melalui pengembangan usaha kecil dan menengah di wilayah kelurahan Bandungrejosari. Upaya pengembangan usaha kecil dan menengah bagi kader PKK sebagai solusi penunggakan bayar iuran wajib JKN. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktek usaha kecil bagi kader PKK dan masyarakat di kelurahan Bandungrejosari. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pelatihan kewirausahaan, kerja kelompok, pengembangan jenis usaha, dan praktek usaha kecil. Hasil pengabdian masyarakat terhadap 60 peserta yang hadir dari warga masyarakat kelurahan bandungrejosari, menunjukkan bahwa pengetahuan warga masyarakat pada tingkat excellent sebesar 56,8%, sangat baik 15,7%, dan baik 27,7%. Data hasil praktek usaha kecil menunjukkan 100% peserta mampu mempraktekkan usaha kecil. Selanjutnya peserta akan menjalankan usaha kecil mernengah melalui Pokja-2 bidang sosial, program PKK di kelurahan Bandung rejosari.

Kata kunci: : Kemampuan Ability to pay, JKN Mandiri, small and medium enterprises,

Abstract

The decline in income for some communities due to economic changes is related to the decreasing ability to pay for independent JKN participants (PBP). This is one of the problems faced by BPJS Kesehatan (Indonesian Health Insurance) participants who are in arrears in paying their contributions. Data shows a buildup of arrears in contribution payments, with approximately 50% unable to pay in 2022 (Village Data in 2022). To address this problem, efforts are needed to increase payment capacity through the development of small and medium enterprises in the Bandungregosari village area. Efforts to develop small and medium enterprises for PKK cadres are a solution to the arrears in mandatory JKN contributions. The purpose of this community service is to improve the knowledge and practical skills of small businesses for PKK cadres and the community in the Bandungregosari village. The methods used in this activity include entrepreneurship training, group work, business development, and small business practices. The results of the community service for 60 participants from the Bandungregosari sub-district community showed that the knowledge of community members was at an excellent level of 56.8%, very good at 15.7%, and good at 27.7%. Data from small business practice results showed that 100% of participants were able to practice in small businesses. Furthermore, participants will run small and medium businesses through the social sector Working Group 2 (Pokja-2), PKK program in the Bandungregosari sub-district.

Keywords: *Ability to pay, JKN Mandiri, small and medium enterprises,*

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa rentan gizi, dimana kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat seiring dengan kebutuhan pertumbuhan. Selain peningkatan kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, remaja juga rentan mengalami masalah gizi seperti Pada masa pandemic atau oleh faktor penyebab lain yang dialami masyarakat, sering memberikan dampak ekonomi dan menurunnya pendapatan masyarakat. Berkaitan dengan kewajiban bayar bagi peserta JKN mandiri, hal tersebut merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan

jalan keluar. Seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dengan biaya secara gotong royong.

Sebagai peserta JKN berkewajiban membayar iuran berkala secara mandiri sesuai dengan klas yang dipilihnya. Iuran peserta JKN mandiri diberlakukan mulai tanggal 1 April 2016 dibagi menjadi tiga jenis, yaitu iuran

sebesar Rp. 25.500,00 per orang per bulan untuk ruang perawatan kelas 1, iuran sebesar Rp. 51.000,00 per orang per bulan untuk ruang perawatan kelas 2, dan iuran sebesar Rp. 80.000,00 per orang per bulan untuk ruang perawatan kelas 3 (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan), yang kemudian meningkat di tahun berikutnya. Membayar iuran kepesertaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh peserta program JKN- mandiri. Untuk peserta JKN mandiri, wajib membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Jika peserta tersebut tidak membayar iuran /lewat dari tanggal 10, maka status kepesertaannya akan non aktif sementara. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah peserta yang menunggak bayar atau tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar

iuran. Data menunjukkan bahwa ketertiban peserta mandiri atau peserta mandiri yang memenuhi kewajiban membayar iuran adalah sekitar 61% sepanjang tahun 2018 (Prasetia, 2019). Yang artinya, masih terdapat sekitar 39% peserta dari sektor mandiri yang tidak tertib atau tidak memenuhi kewajiban membayar iuran JKN. Sebagai salah satu cara adalah dengan mengoptimalkan peran Kader JKN khususnya dalam hal mengingatkan dan penagihan iuran. Menurut Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, hingga Juli 2018, terdapat 1.599 kader JKN yang bergabung dengan BPJS Kesehatan . BPJS Kesehatan mencatat sejak April 2017 sampai dengan Juli 2018, keberadaan kader sangat efektif yang berhasil mengumpulkan dana dari peserta yang menunggak. (Sitanggang, 2018).

Melalui program asuransi kesehatan, masyarakat akan mendapatkan manfaat yaitu pembiayaan kesehatan menjadi lebih ringan dan efektif. Keberadaan program asuransi

kesehatan, mendorong masyarakat dengan sukarela mendaftarkan diri untuk dapat menjadi anggota BPJS. Ini artinya masyarakat mempunyai harapan besar untuk mendapat layanan kesehatan setiap saat dengan mudah.

Berdasarkan data pengabmas tahun 2022, kemampuan bayar peserta mandiri yang terjadi di masyarakat kelurahan Bandungrejosari belum dilakukan pemantauan secara periodik. Kenyataannya telah terjadi penumpukan tunggakan pembayaran iuran wajib. Tahun 2022 merupakan tahun dimana terjadinya resiko tunggakan pembayaran iuran pasca pandemic sekitar 50% tidak mampu bayar.. Hal tersebut sebagai dampak dari masa pandemi yang dialami dan menyebabkan kehidupan masyarakat secara sosial dan ekonomi berubah. Untuk mengatasi masalah ini maka t dibuatkan solusi dengan Upaya meningkatkan kemampuan bayar peserta BPJS melalui pengembangan usha kecil dan menengah di kelurahan Bandungrejosaro kecamatan Sukun Kota Malang. Melalui pengembangan usaha kecil dan menengah diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi

penumpukan tunggakan pembayaran iuran wajib JKN mandiri , serta mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daan membantu peserta JKN mandiri yang menunggak bayar iuran.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan **pelatihan keterampilan** bagi para kader PKK di Kelurahan Bandungrejosari. Pelatihan dilakukan secara langsung dengan penyampaian materi lisan mengenai strategi peningkatan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kader dalam mendukung kemampuan bayar peserta JKN-KIS Mandiri melalui peningkatan pendapatan berbasis usaha rumahan. Setelah sesi pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan **diskusi kelompok** untuk menggali permasalahan yang terjadi di setiap RW, khususnya terkait kendala warga dalam membayar iuran dan faktor-faktor yang menyebabkan keinginan untuk berhenti atau dropout dari kepesertaan JKN-KIS Mandiri.

Tahap berikutnya adalah **kerja kelompok**, di mana peserta bersama kader PKK mendiskusikan bentuk usaha dagang yang potensial, mengidentifikasi permasalahan ekonomi warga, serta merumuskan solusi yang realistis dan dapat diterapkan. Proses ini bertujuan membangun pemahaman bersama antarwarga mengenai kondisi perekonomian mereka serta mencari alternatif upaya peningkatan pendapatan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan **pengembangan UKM/ perkoperasian**, yang berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan praktis kepada warga mengenai strategi pengembangan usaha agar lebih produktif dan berkelanjutan. Sebagai tahap akhir, kader PKK melakukan **pendampingan melalui simulasi** kepada masyarakat. Setiap kader membimbing lima Kepala Keluarga (KK) peserta JKN Mandiri untuk mempraktikkan keterampilan pengembangan usaha sesuai materi pelatihan. Pendampingan ini mencakup bimbingan pengisian program JKN-KIS, pelatihan teknis usaha, hingga monitoring perkembangan kegiatan usaha warga.

Dengan adanya simulasi ini, diharapkan peserta mampu mengembangkan usaha secara mandiri sehingga dapat memenuhi kewajiban iuran JKN Mandiri secara konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian masyarakat terhadap warga Kader PKK kelurahan Bandungrejosari secara berkelompok baik pengetahuan dan ketrampilan tentang Usaha kecil dan menengah didapatkan seperti dalam tabel berikut :Tabel 1 Data pengetahuan usaha kader PKK kelurahan Bandungrejosari

No	Kategori	Frekwensi	Prosentase
1	Baik	12	27,7
2	Sangat Baik	7	15,5
3	Excelent	25	56,8
Total		44	100

Berdasarkan data diatas menunjukkan sebgaiian besar 56,8% ,kader PKK telah memiliki pengetahuan tentang usaha kecil menengah. Hasil data yang lain yaitu tentang ketrampilan praktek usaha kecil dari kader PKK yang mengikuti menunjukkan 100% mampu mempraktekkan usaha kecil menengah sesuai pengetahuan yang didapat. Kader PKK melanjutkan menjalankan usaha yang didapatkan

dalam kegiatan pengabmas kepada kader di pokja -2 bidang social dan usaha PKK kelurahan Bandungrejosari. Usaha tersebut telah dijalankan secara terus menerus dan dilakukan laporan berkala setiap bulan kepada ketua PKK. Praktek usaha telah memberikan kontribusi kepada peserta JKN mandiri yang tunda bayar di kelompok PKK sampai di tingkat RT masing-masing. Kegiatan pengabmas upaya meningkatkan kemampuan bayar telah berdampak kepada warga peserta JKN mandiri terutama yang aktif menggunakan layanan kesehatan karena penyakit kronis yang dideritanya.

Pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dengan metode pemberian pengetahuan dan ketrampilan usaha dapat memberikan dampak hasil yang bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan PKK di 13 RW Pokja-2 kelurahan Bandungrejosari bidang perkoperasian dan penjualan bahan pokok. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan salah satunya adalah dapat memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS disetiap bulan

dengan besaran bervariasi dari klas 3 sebesar Rp. 35.000, klas- 2 sebesar Rp.100.000, dan klas-1 Rp.150.000. (PP No 64/2020)

Sejalan dengan prinsip BPJS sebagai penyelenggara asuransi sosial adalah berprinsip Gotong Royong (UU No 24 th 2011). Untuk itu dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada warga melalui kader PKK tentang usaha perkoperasian di pokja-2 PKK tingkat RT serta mendampingi warga dalam memenuhi kebutuhan kemampuan bayar. Pendapatan keuntungan dari penjualan sembako , dijadikan dana bersama untuk memenuhi peserta JKN mandiri yang menunggak bayar iuran. Kegiatan penjualan akan diteruskan dan dijalankan di kelompok PKK RW PKK -RT serta seluruh anggota PKK. Pokja-2 bidang usaha perkoperasian dan penjualan di PKK tingkat RT dari 13 RW, meliputi sekitar 130 kelompok PKK RT. Hal ini menunjukkan setiap Pokja-2 bidang usaha perkoperasian dan penjualan PKK RT, telah mampu melakukan usaha dan mengumpulkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan

untuk membantu pembayaran iuran peserta JKN mandiri dengan mekanisme yang diatur di PKK RT. Modal awal telah disediakan oleh tim pengabdian masyarakat yang selanjutnya dijalankan oleh pokja-2 bidang koperasi dan penjualan PKK tingkat RT di kelurahan Bandungrejosari kecamatan Sukun Kota Malang.

Modal awal berasal dari Hibah tim pengabdian masyarakat, berupa belanja senilai Rp. 500.000, dalam bentuk bahan penjualan berupa : sabun cuci, pewangi, sabun mandi, pasta gigi, gula, kopi, the, minyak goreng, kecap. Modal tersebut terus dijalankan melalui penjualan di kelompok PKK RW dan RT kelurahan Bandungrejosari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan, Dari kegiatan Pengabmas yang telah dilaksanakan di kelurahan Bandungrejosari kecamatan Sukun dapat disimpulkan sebagai berikut :Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun,

menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan UKM perkoperasian yang dijalankan oleh PKK, khususnya Pokja yang membidangi perkoperasian dan penjualan, memberikan dampak signifikan bagi warga. Melalui diklat yang diberikan, pengetahuan dan keterampilan warga dalam melakukan aktivitas penjualan mengalami peningkatan. Program perkoperasian yang berjalan di tingkat PKK RT juga terbukti mampu menghasilkan keuntungan, yang kemudian dikelola dan disumbangkan untuk membantu warga peserta BPJS JKN Mandiri yang mengalami kesulitan dalam membayar iuran.

Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kemampuan Pokja 2 PKK dalam mengelola sistem penjualan dan keuangan hasil usaha secara lebih teratur dan profesional. Pokja 2 juga menunjukkan kreativitas yang baik dalam memilih variasi bahan dan produk penjualan, sehingga tidak hanya mengandalkan modal awal dari hibah pengabdian masyarakat, tetapi juga mampu mengembangkan usaha untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Program perkoperasian yang telah berjalan ini direncanakan akan

terus berlanjut sebagai dana bersama berbasis gotong royong, dengan tujuan membantu pemenuhan kewajiban pembayaran iuran JKN Mandiri bagi anggota kelompok PKK Kelurahan Bandungrejosari secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiliyah, Nur Pratiwi. 2018. *Faktor yang Mempengaruhi Keteraturan Membayar Iuran Pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kategori Peserta Mandiri*. Jember: Universitas Jember
- Basrovi, 2011, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bruce, Andy dan langdon, Ken. 2004. *Mengutamakan pelanggan*. Yogyakarta : Zenith Publizer
- BPJS , 2018 , *Panduan Layanan Bagi Peserta JKN*.
- Depkes RI. 2008. *Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Dhilla, M.P. 2016. *Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Membayar Iuran JKN di Kota Padang Tahun 2016*. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas.
- Kasmir, 2011, *Kewirausahaan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Keputusan Gubernur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2019.
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- Prasetya, Fransiskus Adhiyuda. 2019. *Dirut BPJS: Peserta Bukan Penerima Upah Tidak Tertib Bayar Iuran*. <https://tribunnews.com>
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional